

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Penegasan Istilah	22
BAB II KERANGKA TEORI	30
A. Kajian Teori	30
1. Teori Rekonstruksi Hukum	30
2. Teori Kedaulatan Negara	34
3. Teori <i>Historical of Law (Historical Legal Theory)</i>	38
4. Teori Keadilan Bermartabat	42
5. Teori Tujuan Pemidanaan	47

6. Teori <i>Locus Delicti</i>	55
7. Teori Transaksi Keuangan (transparansi, akuntabilitas dan inklusifitas keuangan)	60
8. Teori Politik Hukum	64
B. Penelitian Terdahulu	69
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis Penelitian	83
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Sumber Bahan Hukum	85
D. Teknik Pengumpulan Data	87
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	88
BAB IV DISHARMONI PENGATURAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA PASCA REFORMASI KUHP 2023	90
BAB V HARMONISASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA DALAM PENGATURAN TIPIKOR MELALUI PENDEKATAN EKSTRATERITORIAL YURISDIKSI	111
A. Tujuan Harmonisasi antara Hukum Internasional dan Nasional Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	111
B. Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Dasar Legitimasi Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia	119
C. Penguatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Konstruksi Hukum dengan Pendekatan <i>Extraterritorial Jurisdiction</i>	126
BAB VI PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN TRANSAKSI GUNA Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lintas Wilayah	140
A. Urgensi Penerapan Kebijakan Pembatasan Transaksi secara Preventif dan Represif dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi	140
B. Rekonstruksi Politik Hukum Kebijakan Pembatasan Transaksi di Indonesia	180
C. Design Ideal Undang-undang Pembatasan Transaksi	199
BAB VII PENUTUP	243
A. Kesimpulan	243
B. Saran	246

DAFTAR PUSTAKA.....	249
LAMPIRAN.....	268

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan	4
Tabel 4. 1 Distorsi Pasal KUHP 2023 dan UU TIPIKOR.....	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Trend Skala Peningkatan Tindak Pidana Korupsi Indonesia.....	5
Grafik 4. 1 Berat Ringan Hukum Koruptor	106
Grafik 6. 1 Perbandingan Recovery Kerugian Negara.....	147
Grafik 6. 2 Kasus Suap di Indonesia Muncul dari TIPIKOR dan TPPU	151
Grafik 6. 3 Pembentukan Satuan Khusus INTRACS.....	223